

INTERDEPENDENSI ANTARA BAHASA INDONESIA DENGAN IPTEK SEBAGAI PENGHELA PEMBENTUKAN ISTILAH MELALUI MEDIA BAHASA

Agus Wismanto
FKIP Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Kenyataan menunjukkan bahasa Indonesia tidak mempunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat dapat dirinci perbedaan konsep (Moeliono, 1985: 58) misalnya yang dilambangkan dalam bahasa Inggris. Menurutnya, salah nalar yang mendasarinya merupakan simpulan yang diambil oleh penutur bahwa kata yang diperlukan tidak terdapat dalam kosa kata perbandingan. Dengan kesalahan itu, apa yang tidak dikenalnya adalah dianggap tidak terdapat dalam bahasa Indonesia.

Dengan memerhatikan hal tersebut, bahasa Indonesia perlu diletakkan dalam bingkai perencanaan bahasa yang lebih matang dan terencana. Bahasa Indonesia diletakkan menjadi penarik/ penghela ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Salah satu yang dapat diwujudkan adalah perencanaan bahasa Indonesia bidang peristilahan (pembentukan istilah). Hal ini disadari sepenuhnya bahwa perubahan bahasa yang sungguh sangat mengemuka dan paling peka terhadap perubahan kehidupan ialah bidang peristilahan. Dan juga sebaliknya, mestilah Iptek mampu menjadi daya dorong sekaligus penghela terbentuknya istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan Indonesia cerdas diwujudkan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. (2) Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiprah di dunia internasional dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia. (3) Pembentukan istilah bahasa Indonesia diharapkan mampu mendukung bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan teknologi, Dan sebaliknya, Iptek juga mampu menjadi daya dorong dan sekaligus penghela terbentuknya istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian pada pembentukan istilah BI dengan memerhatikan aspek berikut ini (1) BI hendaknya diberi kesempatan membuka diri guna menerima istilah bahasa lain; (2) Peristilahan BI mampu menggambarkan realitas kehidupan serta mengejawantahkan konsep konsep Iptek; (3) Peristilahan bahasa Indonesia itu tersebarluaskan berbagai media, kegiatan perkamusian tetap digalakkan, dan ketersediaan website dalam internet sebagai bank peristilahan.

Kata kunci: .Bahasa Indonesia dan Iptek

A. PENDAHULUAN

Apa bagian pertama politik..? Pendidikan. Bagian kedua..? Pendidikan. Dan bagian ketiga..? Pendidikan. Begitulah seorang Jules Michelet, dalam *Le Peuple* (846) menggambarkan pentingnya pendidikan. (Derap Guru Jawa Tengah-Edisi Nopember 2013).

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kebijakan dan usaha yang terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah yang berupa penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agar kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik, dibutuhkan kebijakan di bidang pendidikan yang memungkinkan proses pendidikan

berlangsung secara terencana dan menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, teknologi pada era global dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan juga harus mengakomodasi penggunaan bahasa Indonesia secara proporsional. Dalam proses pendidikan, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis baik pada tataran yudikatif (hukum), legislatif (pengambilan kebijakan), maupun pada tataran eksekutif (pelaksanaannya). Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pengantar pada dunia pendidikan.

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga ingin memiliki sumber daya manusia dan sumber daya Iptek berkualitas sebagaimana dengan negara-negara maju. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu variabel pendukung adalah alat komunikasi berupa kemapanan dan kemantapan bahasa. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan bahasa harus dirumuskan secara komprehensif dan futuratif sehingga pelaksanaannya dapat secara optimal dan berkontribusi dalam terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia juga harus tetap berdasarkan pada nilai-nilai persatuan kebangsaan yang berdaulat dengan menyesuaikan dinamika perkembangan zaman pada era global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Iptek saat ini merupakan kata kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Perjalanan sejarah serta pengalaman beberapa negara ternyata inovasi teknologi merupakan salah satu aspek yang memiliki daya dorong yang sangat tinggi bagi daya saing suatu bangsa. Hal ini menunjukkan pergeseran yang besar dalam paradigma pembangunan suatu negara, yang semula hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai tumpuan pembangunan berubah menjadi sumber daya manusia dan sumber daya Iptek. Beberapa negara maju bahkan sudah lama menjadikan Iptek sebagai pendukung atau dalam pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan betapa sangat berperannya teknologi dan informasi dalam pembangunan suatu bangsa.

Putro (2012:5) mengemukakan bahwa: (1) Pengembangan Iptek tersebut berhasil apabila pengimplementasiannya

mengakar kuat pada kelompok-kelompok masyarakat yang relevan untuk itu dibutuhkan kemantapan bahasa yang secara komunikatif mampu mengomunikasikan proses adopsi dan sosialisasinya. (2) Bahasa Indonesia dipandang mantap bila mampu memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk peningkatan dan mobilitas kapasitas sumber daya manusia.

Substansi Iptek dapat diadopsi dan disebarluaskan secara cepat melalui media bahasa khususnya yang mampu mengejewantahkan konsep-konsep Iptek. Oleh karena itu, bahasa Indonesia patut untuk diletakkan pula sebagai bahasa yang mampu menjadi penarik atau penghela ilmu pengetahuan dan menjadi wahana Iptek. Dan sebaliknya, mestilah Iptek mampu menjadi daya dorong dan sekaligus penghela terbentuknya istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyataan menunjukkan bahasa Indonesia tidak mempunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat dapat dirinci perbedaan konsep (Moeliono, 1985: 58) misalnya yang dilambangkan dalam bahasa Inggris. Menurutnya, salah nalar yang mendasarinya merupakan simpulan yang diambil oleh penutur bahwa kata yang diperlukan tidak terdapat dalam kosa kata perbandingan. Dengan kesalahan itu, apa yang tidak dikenalnya adalah dianggap tidak terdapat dalam bahasa Indonesia.

Demikian pula dengan bidang jurnalistik, Asraatmadya dalam Sugono, (2003:86) mengemukakan bahwa

jurnalistik Indonesia telah kebanjiran kata-kata impor, dan bahasa asing. Menurutnya, gejala ini tidak semata-mata kesalahan wartawan saja tapi oleh banyaknya istilah baru yang belum dijumpai padanannya yang tepat atau mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia.

Dengan memerhatikan hal tersebut, bahasa Indonesia perlu diletakkan dalam bingkai perencanaan bahasa yang lebih matang dan terencana. Bahasa Indonesia diletakkan menjadi penarik/ penghela ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Salah satu yang dapat diwujudkan adalah perencanaan bahasa Indonesia bidang peristilahan (pembentukan istilah). Hal ini disadari sepenuhnya bahwa perubahan bahasa yang sungguh sangat mengemuka dan paling peka terhadap perubahan kehidupan ialah bidang peristilahan. Dan juga sebaliknya, mestilah Iptek mampu menjadi daya dorong sekaligus penghela terbentuknya istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini berjudul “Kebijakan Bahasa Indonesia dalam Perspektif Pencapaian Tujuan Nasional: Interdependensi antara Bahasa Indonesia dengan Iptek sebagai Penghela Pembentukan Istilah melalui Media Bahasa”.

B. KEBIJAKAN BAHASA INDONESIA

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 149) berarti (1) kepandaian, kemahiran kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi dsb.); pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Rubin dan Jernudd (1971) dalam Cooper (1989: 30) mengatakan bahwa language planning adalah perubahan bahasa yang disengaja, yaitu perubahan dalam sistem kode bahasa atau berbicara atau keduanya yang direncanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk tujuan tersebut atau diberikan mandat untuk memenuhi tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan bahasa berfokus pada pemecahan masalah dan ditandai dengan formulasidan evaluasi alternatif untuk memecahkan masalah bahasa untuk menemukan keputusan yang terbaik (optimal, paling efisien).

Fishman et al. (1971: 293) dalam Kumaran Rajandran (2008: 237) mengatakan bahwa: language policy as the decisions taken by constituted organizations with respect to the functional allocation of codes within a speech community. Kebijakan bahasa sebagai keputusan yang diambil oleh organisasi dibentuk sehubungan dengan alokasi fungsional kode dalam masyarakat tutur.

Chaer & Agustina (2010: 177) mengatakan bahwa kebijakan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai

alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur berbeda.

Shohamy (2006: 45) memberikan pengertian kebijakan bahasa atau language planing yaitu mekanisme utama dalam menyusun, mengatur, dan memanipulasi perilaku kebahasaan karena kebijakan bahasa terdiri atas keputusan dalam pembuatan bahasa dan penggunaannya dalam masyarakat.

Forough Rahimi (2011: 143-148) menjelaskan kebijakan bahasa Spolsky yang digambarkan melalui tiga serangkai jalinankonsep yaitu, 'language practices' (praktik bahasa, yaitu cara berbagai linguistik biasanya dipilih dalam suatu masyarakat), 'language ideology and beliefs' (ideologi bahasa dan keyakinan tentang bahasa dan penggunaannya), dan 'language management and planning'.

Spolsky dalam bukunya *Language Management* (2009:1) mengungkapkan bahwa *Language policy is all about choices*. Kebijakan pemilihan bahasa dalam suatu negara sebenarnya hanyalah masalah pilihan bahasa saja. Apakah anda akan memutuskan untuk bilingual (dwi bahasa) atau plurilingual (multi bahasa). Bahkan jika bahasanya hanya ada satu, anda harus juga memilih dialects (dialek) dan styles (gaya). Sebagai contoh, Spolsky menuturkan bahwa ada banyak varian bahasa Cina di antara penuturnya, dan diantara penutur bahasa Cina tersebut mereka tidak saling mengetahui, tetapi mereka sepakat bahwa mereka menggunakan bahasa Cina.

Kebijakan bahasa itu dapat diartikan sebagai pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberi perencanaan, pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Spolsky (2009:3) mengungkapkan bahwa bahasa akan dituturkan menurut domain atau komunitas tertentu seperti rumah, keluarga, sekolah, tetangga, gereja, masjid, tempat kerja, media publik atau level pemerintahan.

Masalah-masalah kebahasaan yang dihadapi setiap bangsa tidaklah sama, sebab tergantung terhadap situasi kebahasaan yang ada di dalam negara itu. Negara-negara yang sudah memiliki sejarah kebahasaan yang cukup, dan di dalam negara itu hanya ada satu bahasa saja (meskipun dengan berbagai macam dialek dan ragamnya) cenderung tidak mempunyai masalah kebahasaan yang serius. Negara yang demikian misalnya sudi arabia, Jepang, Belanda dan Inggris. Tetapi negara-negara yang terbentuk, dan memiliki banyak bahasa daerah akan memiliki potensi persoalan kebahasaan yang cukup serius, dan kemungkinan untuk timbulnya gejolak sosial dan politik akibat persoalan bahasa ada. Indonesia sebagai negara yang relatif baru dengan bahasa daerah yang lebih dari 400 buah, terselamatkan karena masalah kebahasaan sudah terselesaikan sejak tahun 1928.

Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) menyelenggarakan kongres yang bertujuan untuk mendapat bentuk

persatuan di antara pemuda-pemuda Indonesia. Pada hari Minggu 28 Oktober 1928 malam, keputusan kongres mendeklarasikan tiga hal: Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kedua: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada sidang penutupan itu pula diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di depan umum, diiringi dengan gesekan biola W.R. Supratman. Hari kedua Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah menetapkan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Ketetapan tersebut tertuang dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36.

Sementara, penetapan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia dilakukan oleh Dewan Menteri Kabinet Soekarno pada tanggal 30 Mei 1958 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958. Sejak ditetapkannya sebagai bahasa nasional, pemerintah terus menerus mengupayakan bukan saja penggunaan bahasa Indonesia di seluruh daerah tetapi juga penyempurnaannya. Pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan disepakati untuk membangkitkan rasa cinta pada bahasa Indonesia sekaligus menggunakan bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional.

Di era pemerintahan Soeharto, beberapa penyempurnaan dan penggunaan

bahasa nasional ditingkatkan. Didukung oleh Instruksi Presiden tentang pembangunan sekolah-sekolah dasar hingga ke seluruh pelosok Indonesia, maka pelajaran Bahasa Indonesia semakin merata di seluruh Indonesia. Hasilnya kita semua tahu, bahwa bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa sehari-hari mulai dari Papua, Aceh hingga Timor Timur saat masih menjadi bagian dari negara Indonesia. Kita patut bangga atas pencapaian yang sangat paripurna dari bangsa ini terutama menyangkut bahasa Indonesia. Ini membuktikan bahwa sebuah kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah akan sangat bermanfaat apabila dimulai dari visi mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Kita tidak bisa membayangkan apabila para pemuda pemudi yang tergabung dalam PPPI tidak melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Mungkin orang Jawa yang pergi ke Sulawesi tidak bisa memahami dialog mereka karena menggunakan bahasa daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan di atas, dalam kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam suatu pemerintahan atau organisasi, instansi ataupun perseorangan, termasuk identifikasi berbagai alternatif program dan kegiatan yang dikelola dengan baik, yang menjadi pedoman tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Begitu pun dengan kebijakan bahasa.

Kebijakan tentang bahasa Indonesia di Indonesia bisa kita urai dari beberapa

keputusan yang diambil bangsa Indonesia dan dokumen-dokumen seperti berikut.

1. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Pengakuan bangsa Indonesia terhadap bahasa persatuan ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:

Pertama :

KAMI POETRA DAN POETRI
INDONESIA
MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH
JANG SATOE, TANAH AIR
INDONESIA

Kedua :

KAMI POETRA DAN POETRI
INDONESIA, MENGAKOE
BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA
INDONESIA

Ketiga :

KAMI POETRA DAN POETRI
INDONESIA MENDJOENJOENG
BAHASA PERSATOEAN, BAHASA
INDONESIA

Ikrar yang ketiga sungguh membuka mata dan rasa seluruh bangsa Indonesia, bahkan warga dunia. Betapa tidak, di Indonesia berkembang berbagai bahasa daerah, tetapi pemuda-pemudi Indonesia tidak hanya “mengakoe”, bahkan “mendjoenjoeng” bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Pada UU No. 20 Tahun 2003 ini, masalah bahasa Indonesia diatur pada BAB VII Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal 37 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi wajib memuat bahasa.

4. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang RI No. 24 tahun 2009 mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bagian undang-undang yang berkaitan dengan bahasa terdapat pada Bab dan pasal berikut.

a. Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bab III Pasal 25 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi

- niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
- c. Pasal 26-39 mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang selanjutnya pada pasal 40 disebutkan ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden.
 - d. Pasal 40 dan 43 mengatur Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia.
 - e. Pasal 44 mengatur Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional.
 - f. Pasal 45 mengatur Lembaga Kebahasaan.
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2009. Perpres ini terdiri atas 3 Bab dan 17 pasal yang mengatur pidato resmi pejabat negara di luar negeri dan di dalam negeri baik pada forum internasional maupun forum nasional.

C. PENDIDIKAN NASIONAL

Kata pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 263) berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara perbuatan mendidik.

Konsep pendidikan dalam Perguruan Tamansiswa adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi

bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa rasa anak didik, agar dalam menjalani garis kodrat pribadinya serta dalam menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir batin (Buku Saku Tamansiswa, 2012: 32).

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Crow (dalam Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada disekitarnya. Sejalan dengan yang disampaikan Richards & Schmidt (2002: 174) bahwa pendidikan adalah proses belajar mengajar baik formal maupun nonformal dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, tingkah laku, serta pemahaman pada area tertentu.

Dalam UU No. 2 tahun 1989 pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional (pasal 1 ayat 1) disebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam pasal 3 dijelaskan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan di atas, dalam pendidikan minimal selalu terdapat tiga unsur dasar, yaitu (1) usaha atau rencana pendidikan, (2) proses pendidikan, dan (3) hasil/tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
Dalam UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional Indonesia sekarang ini diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut akan

diuraikan beberapa hal berkaitan dengan pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang.

a. Dasar dan Fungsi Pendidikan Nasional

Pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pada pasal 3 berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
- 3) menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

c. Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan

standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan (1) peningkatan iman dan takwa, (2) peningkatan akhlak mulia, (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (6) tuntutan dunia kerja, (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (8) agama, (9) dinamika perkembangan global; dan (10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

3. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara kelembagaan, pendidikan nasional Indonesia di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 (merupakan revisi Renstra Kemdiknas

Tahun 2010-2014), ada beberapa hal yang perlu dicermati berkenaan dengan kebijakan dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional seperti berikut.

a. Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan manusia seutuhnya;
- 2) Pengembangan konvergensi peradaban;
- 3) Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik
- 4) Pendidikan untuk semua;
- 5) Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B);
- 6) Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Indonesia (2013: 4-7).

b. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Misi Kemdikbud adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan

- 3) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- 5) Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
- 6) Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia (2013: 37).

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Hal tersebut juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (Convention on the

Protection and promotion of the diversity and cultural expression) (2013:47).

D. KEBIJAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Bahasa Mencerdaskan Bangsa

Pendidikan nasional Indonesia dalam UUD 1945 dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan merupakan faktor yang sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Kecerdasan harus dimaknai secara komprehensif yang mencakup kecerdasan intelektual atau Intelegent Quantum(IQ), kecerdasan emosional atau Emotional Quantum(EQ), dan kecerdasan spiritual atau Spiritual Quantum(SQ). Dalam IQ terkandung kecerdasan linguistik dan matematika, dalam EQ terkandung kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, dan dalam SQ lebih terfokus pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Kecerdasan linguistik dalam IQ terlihat pada keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Imelda Vance dalam Risalah Kongres Bahasa VIII, 2011: 782). Empat keterampilan berbahasa tersebut sangat berkontribusi ketika seseorang mengaktualisasikan EQ dan SQ. Oleh karenanya, kemampuan penggunaan bahasa termasuk salah satu indikator kecerdasan.

Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu

cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Secara khusus, cerdas emosional dan sosial bermakna insan tersebut harus dapat beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya, serta mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dengan membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara (Renstra Kemdikbud, 2013: 37-38). Uraian makna cerdas sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia di atas mengisyaratkan peran bahasa yang sangat besar.

Begitu pentingnya peran bahasa Indonesia dalam ikut serta mewujudkan insan Indonesia cerdas, Kemdikbud merencanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk mendukung terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa yang bermartabat. Kongres Bahasa Indonesia X yang berlangsung di Jakarta tanggal 28-31 Oktober 2013 menghasilkan 33 rekomendasi. Beberapa butir menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai media pendidikan karakter dalam mencerdaskan bangsa dan menaikkan

martabat dan harkat bangsa, serta memperkuat jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.

2. Perjalanan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Sudah 69 tahun Indonesia merdeka. Sudah 76 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan. Perjalanan bahasa Indonesia yang awalnya berfungsi sebagai lingua franca, menjadi bahasa persatuan dengan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai dengan menjadi bahasa negara yang secara yuridis telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang RI, dan Peraturan Presiden telah membuktikan keampuhannya. Namun, perlu direnungkan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan di tingkat pusat sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang baru saja menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia X.

Pada Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia X tanggal 28 Oktober 2013, Nuh, Mendikbud RI, menyampaikan

keinginannya agar peran bahasa Indonesia di kancah global diperkuat dengan mengikuti peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik yang masuk kelompok G-20 dan hendaknya juga diiringi peran dari aspek sosial dan budaya, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, yang saat ini termasuk bahasa dengan jumlah penutur keempat terbesar di dunia dan dipelajari di 45 negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sekadar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiprah di dunia internasional dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia. Nuh menambahkan bahwa saat ini telah dilakukan kerja sama Indonesia dengan berbagai perguruan tinggi di dunia untuk mendirikan pusat pembelajaran bahasa Indonesia, seperti kerja sama yang telah terjalin dengan Cina, Australia, dan Jerman (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita>).

Berita ini sungguh merupakan kebanggaan sekaligus tantangan agar bahasa Indonesia terus berkembang tidak hanya sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara, tetapi juga Bahasa Internasional.

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai Bahasa Nasional dan sebagai Bahasa Negara. Dalam kedudukannya sebagai Bahasa Nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya

dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bahasa Negara berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bila kita kaitkan dengan tujuan Pendidikan Nasional, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di atas seharusnya bisa menjadi media strategis sekaligus pesan dalam mencerdaskan bangsa. Sayangnya banyak pihak yang belum mengindahkan. Bahkan, Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Se-Indonesia (IMABSII) kecewa dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasalnya dalam pidato kenegaraannya pada kegiatan APEC Oktober 2013 di Bali tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mereka menilai SBY tidak menghargai bahasa Indonesia dan telah menjadi tamu di negaranya sendiri (<http://kabarkampus.com/2013/10/sby-dinilai-remehkan-bahasa-indonesia/>).

Padahal dalam pasal 28 UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Bahkan, khusus pasal inilah yang sudah dirinci dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2010

tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Kongres Bahasa Indonesia X juga menghasilkan rekomendasi agar Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2010 tersebut.

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah

Pembelajaran Bahasa Indonesia harus komunikatif dan konstruktif, berbasis proses maupun hasil. Oleh karenanya, Pembelajaran Bahasa Indonesia menurut Kurikulum 2013 menuju pada pembelajaran berbasis teks dan berbasis kompetensi.

a. Kurikulum Bahasa Indonesia

Dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam rangka menyiapkan lahirnya generasi emas, pada tahun akademik 2013 ini Kemendikbud secara bertahap dan terbatas telah melaksanakan Kurikulum 2013 di 6.326 sekolah yang tersebar di 295 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud tertanggal 8 November 2013, mulai tahun akademik 2013/2014 akan diberlakukan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan SD kelas I, II, IV, dan V; SMP pada kelas VII dan VIII; serta SMA/SMK

pada kelas X dan XI. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah khususnya bagi siswa SD kelas II dan V, SMP kelas VIII, serta SMA/SMK kelas XI pada satuan-satuan pendidikan yang tahun ini belum menjadi uji terbatas Kurikulum 2013. Oleh karenanya, para peserta didik dan komponen satuan pendidikannya harus betul-betul disiapkan.

Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia cerdas yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Itu sebabnya perlu dirumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, mencoba (observation based learning), dan dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan (networking) melalui collaborative learning untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.

Ada empat elemen dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang akan berubah, yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 diberikan di SD dengan pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum Bahasa Indonesia mempunyai alokasi waktu yang lebih dibanding dengan KTSP. Untuk kelas I dan kelas II SD, mapel Bahasa Indonesia 8 jam seminggu, untuk kelas III sampai kelas VI 10 jam seminggu. Dengan demikian, posisi mapel Bahasa Indonesia akan menjadi sentral bagi mapel lainnya.

Bahasa Indonesia akan dapat memperkuat jati diri anak bangsa yang cerdas komprehensif. Kongres Bahasa Indonesia X pun memberikan rekomendasi agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendampingi implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bekerja sama dengan BSNP dalam pengadaan buku materi pelajaran.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah

Penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 4 diatur sebagai berikut.

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran sangat penting sehingga komponen-komponen yang berkaitan dengan proses harus betul-betul diperhatikan oleh pendidik/guru baik yang berhubungan dengan materi, strategi dan metode, media dan sumber belajar, maupun evaluasi pembelajaran. Pembelajaran di sekolah tidak terbatas empat dinding, bisa di dalam dan di luar kelas. Proses pendidikan berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat sepanjang hayat. Itulah makna Tripusat Pendidikan, warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Materi pembelajaran seharusnya berisi berbagai hal kekayaan Indonesia baik yang berupa dokumen nasional maupun daerah (misalnya Pancasila, naskah Proklamasi, cerita-cerita rakyat, dll.) dengan segala permasalahan dan solusinya, berupa gambaran kekayaan sosial budayanya, maupun berupa berbagai problema internasional-nasional-regional yang membuka wawasan siswa bertambah mencintai bangsanya sendiri, memeliharanya, dan meningkatkannya. Hal penting berkaitan dengan materi pembelajaran, selama ini masih ada yang struktural, terlepas dari konteks; tekstual belum kontekstual. Kalau pun dalam

konteks, teks-teks yang disuguhkan masih sering lepas, bukan merupakan teks yang utuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 berbasis teks yang menyuguhkan teks sebagai sajian keseluruhan informasi yang utuh, bukan potongan kalimat atau paragraf yang lepas dari keseluruhan konteks.

Empat keterampilan berbahasa harus disajikan secara terpadu dengan media dan sumber belajar yang variatif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran dipilih yang memberikan wadah bagi peserta didik untuk bisa berbagi sekaligus bereksistensi, kompetitif yang sportif berkarakter, dan sekaligus dapat mengembangkan fungsi-fungsi bahasa secara optimal. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran bahasa meliputi tiga ranah: sikap/afektif, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.”, ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”, dan ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”. Pembelajaran seperti ini hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang

baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan bangsa yang cerdas komprehensif.

Kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri atas Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti terdiri atas empat KI. KI-1 berkenaan dengan afektif spiritual, KI-2 afektif sosial, KI-3 berkenaan dengan pengetahuan, dan KI-4 keterampilan. Keempat KI ini harus secara terpadu dan proporsional dicapai dalam pembelajaran.

c. Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah

Penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian sekarang ini diatur dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013. Dalam Permendikbud tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional menjadi parameter utama untuk merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas 8 (delapan) standar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah dan/atau lembaga mandiri, menggunakan acuan kriteria, yang didasarkan pada prinsip-prinsip: objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, sistematis, dan edukatif. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang telah ditetapkan.

Penilaian pembelajaran pada Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input – proses – output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effects*) dan dampak pengiring (*nurturant effects*) dari pembelajaran. Penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mencakup capaian kompetensi peserta didik baik pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Penilaian autentik ini, melihat kecerdasan majemuk baik berkenaan dengan sikap berbahasa, pengetahuan bahasa, dan terampil berbahasa yang akan mendasari tercapainya insan Indonesia cerdas dalam menggunakan fungsi-fungsi bahasa.

4. Bahasa sebagai Pengembangan Iptek

Pada Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia X tanggal 28 Oktober 2013, Mendikbud RI, menyampaikan keinginannya agar peran bahasa Indonesia di kancah global diperkuat dengan peran dari aspek sosial budaya dan Iptek, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, yang saat ini termasuk bahasa dengan jumlah penutur keempat terbesar di dunia dan dipelajari di 45 negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sekadar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiprah di dunia internasional

dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia. Untuk itu bahasa juga harus diperankan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Iptek).

5. Iptek Memunculkan Pembentukan Istilah Bahasa

Ipteks saat ini merupakan kata kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Perjalanan sejarah serta pengalaman beberapa negara ternyata inovasi teknologi merupakan salah satu aspek yang memiliki daya dorong yang sangat tinggi bagi daya saing suatu bangsa.

Berdasarkan *semiotic social Halliday*, dinyatakan bahwa istilah dalam bahasa itu harus mampu menggambarkan realitas kehidupan. Istilah bahasa itu mampu merekam dan membawa gambaran tentang kehidupan pada zaman itu. Istilah yang mampu merekam realitas kehidupan, tentu sangat berguna bagi masyarakat bahasa yang akan menuturkan tentang realitas kehidupan itu. Masyarakat bahasa akan menggunakan istilah itu dalam membicarakan atau menyampaikan informasi mengenai realitas kehidupan itu termasuk konsep tentang Iptek. Artinya, dengan Iptek akan memunculkan pembentukan istilah-istilah bahasa yang digunakan masyarakat bahasa untuk menuturkan realitas kehidupan termasuk konsep tentang Iptek itu sendiri.

E. Interdependensi antara Bahasa Indonesia dengan Iptek sebagai Penghela Pembentukan Istilah melalui Media Bahasa

1. Pengertian Penghela dan Pembentukan Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghela diartikan sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi penghela ilmu pengetahuan perlu memiliki kekuatan penuh sehingga mampu untuk menarik sesuatu benda atau semacamnya.

Hukum Newton menegaskan untuk mendorong sebuah benda atau sejenisnya menjadi penarik bila gaya (F) benda pendorong lebih besar dari pada gaya (F) benda yang akan didorong. Oleh karena itu jika bahasa Indonesia akan dijadikan penarik ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu memiliki kekuatan atau kemantapan. Hukum Coulomb juga menggariskan bahwa magnet bisa memiliki kekuatan menarik benda lain karena memiliki medan magnet. Dengan demikian, kekuatan bahasa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri sehingga penutur berminat menggunakannya. Salah satu bentuknya adalah perlu perencanaan bahasa dalam aspek peristilahan

Perencanaan bahasa Indonesia sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan perkembangan bahasa agar sesuai dengan yang diinginkan sehingga bahasa itu mampu menjadi penarik atau penghela ilmu pengetahuan dan wahana Iptek di tengah masyarakat termasuk pembentukan istilah bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, mestilah Iptek mampu menjadi daya dorong dan sekaligus penghela terbentuknya istilah-istilah

bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesungguhnya, istilah dalam bahasa itu harus mampu menggambarkan realitas kehidupan. Istilah bahasa itu mampu merekam dan membawa gambaran tentang kehidupan pada zaman itu. Istilah yang mampu merekam realitas kehidupan, tentu sangat berguna bagi masyarakat bahasa yang akan menuturkan tentang realitas kehidupan itu. Masyarakat bahasa akan menggunakan istilah itu dalam membicarakan atau menyampaikan informasi mengenai realitas kehidupan itu termasuk konsep tentang Iptek. Artinya, dengan Iptek akan memunculkan pembentukan istilah-istilah bahasa yang digunakan masyarakat bahasa untuk menuturkan realitas kehidupan termasuk konsep tentang Iptek itu sendiri. .

Istilah adalah lambang linguistik yang berupa huruf, bentuk bahasa, atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematis, yang mengandung timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu yang bernilai komunikatif (Wuster, 1931:150, 1961; JK TBN. 1975, Felber, 1984; Picht dan Draskau, 1986; Kamus Dewan 1986).

Istilah (Pedoman Umum Pembentukan Istilah) ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan dengan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.

Jadi pembentukan istilah bahasa Indonesia merupakan proses penciptaan istilah yang dibangun oleh kata atau frase yang dengan cermat mengungkapkan

gagasan, sifat, keadaan, dan proses yang luas dalam bidang tertentu termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kridalaksana (1985:55) mengemukakan pembentukan istilah dalam suatu bahasa dapat dilakukan dengan:

1. Mengambil kata atau frase umum yang diberi makna tertentu dalam bahasa Indonesia.
2. Membuat kombinasi dari kata-kata umum.
3. Membentuk kata turunan dari kata dasar yang umum.
4. Membentuk kata turunan dengan analogi.
5. Pinjam/terjemahan.
6. Pembentukan istilah dengan singkatan.
7. Mengambil alih dari bahasa asing/daerah.

Dalam pengambilalihan istilah dari bahasa lain, Kridalaksana menawarkan dua prosedur: (1) menerjemahkan ungkapannya dengan tidak mengubah makna; (2) peminjaman istilah itu dengan penyesuaian dalam bentuk ungkapan-ungkapan.

Peradaban teknologi telah terekam dalam istilah bahasa Inggris sehingga tatkala orang ingin belajar tentang teknologi tentu harus belajar bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena pusaran kemajuan peradaban, baik bidang teknik maupun kemajuan bahasa Inggris menjadi ragam bahasa yang dominan dalam pusaran itu. Ferguson dan Dill (1979) dalam hipotesisnya satu diantaranya menyebutkan bahasa yang dominan di

pusat pembangunan cenderung menjadi bahasa resmi yang dominan untuk komunikasi pada taraf nasional. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa makin banyak penutur bahasa itu secara mandiri melakukan kegiatan itu, makin cepat bahasa pembangunan itu akan mendesak kedudukan bahasa asing yang sebelumnya dipakai. Pernyataan itu dapat ditafsirkan bahwa bahasa yang berprestise, bila para penuturnya mampu menjalankan atau memegang peranan/kunci dalam peradaban manusia dewasa ini.

Oleh karena itu, pilihan yang harus dilakukan untuk menciptakan bahasa Indonesia dan istilah bahasa Indonesia berprestise adalah (1) para penutur BI hendaknya memiliki kualitas sumber daya yang tinggi, menjadi pemegang kunci peradaban, baik teknologi, seni, ekonomi, dan lain-lain. Artinya, bila kita ingin dijadikan istilah bahasa Indonesia berprestise “bernilai jual” ia harus berada pada pusaran peradaban teknologi yang tinggi.

Selanjutnya, pilihan (2) adalah istilah BI harus dimodernkan dengan banyak mengambil/menyerap istilah-istilah asing yang mampu merekam dan menerjemahkan peradaban ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, agama, dan seni yang tinggi kepada para penuturnya. Dengan demikian, istilah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi.

2. Media Bahasa

Pengertian media bahasa dalam makalah ini saya batasi dengan media bahasa yang disebarkan melalui; (1)

media massa, (2) perkamusan, dan (3) internet (wabe-site).

(1) Istilah Itu Tersebarluaskan melalui Media Massa

Media massa pada umumnya, termasuk eletronik dan surat kabar, banyak mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Kualitas kebudayaan masyarakat dapat ditingkatkan atau sebaliknya dapat dirusak oleh media. Demikian halnya dengan bahasa, kualitas keberterimaan istilah BI di tengah masyarakat ditentukan pula oleh media. Media banyak bersentuhan masyarakat. Alwasiah (1997 : 72) menyebut, 65 % dari penduduk Indonesia ini merupakan generasi muda dan mereka dibesarkan oleh TV dan 66% dari anak-anak usia 10 tahun lebih banyak nonton TV sedangkan 22,5% membaca koran.

Media massa memiliki 3 fungsi yakni memberi informasi, mendidik, dan memberi hiburan. Selain itu, Effendi dan Onang (1992) menambahkan fungsi media massa adalah mempengaruhi, membimbing dan fungsi mengeritik. Mencermati fungsi media massa, dapat dikatakan bahwa media massa itu memiliki kekuatan/peran yang luar biasa terhadap suatu masyarakat. Oleh karena itu, media masa harus selalu mengawal informasi yang patut dikomunikasikan dan mana yang tidak patut.

Dengan melihat keberadaan media massa, dapat dikatakan bahwa istilah yang cepat berterima adalah istilah yang terungkap melalui media massa, karena media massa mampu dengan cepat

menyebarkan istilah hingga lapisan bawah masyarakat.

Dapat dicontohkan istilah-istilah berikut ini pada setiap laras bahasa yang begitu cepat penyebarluasannya dan frekuensi pemakaiannya di tengah masyarakat.

<i>Bidang politik</i>	<i>Bidang Sosial Budaya</i>
<i>eksodus</i>	<i>audisi</i>
<i>kandidat</i>	<i>dunia lain</i>
<i>kolusi</i>	<i>eliminasi</i>
<i>korupsi</i>	<i>paranormal</i>
<i>misi</i>	<i>penampakan</i>
<i>money politics</i>	<i>selebriti</i>
<i>nepotisme</i>	<i>platform</i>
<i>poros tengah</i>	<i>Bidang Ekonomi</i>
<i>provokator</i>	<i>jaringan</i>
<i>reformasi</i>	<i>krisis moneter</i>
<i>status quo</i>	<i>likuidasi</i>
<i>visi</i>	<i>restrukturisasi voting</i>
<i>Bidang Iptek</i>	
<i>chatting</i>	
<i>indeks</i>	
<i>internet</i>	
<i>facebook</i>	
<i>ponsel</i>	
<i>situs</i>	
<i>sms</i>	
<i>web site</i>	

Istilah bidang teknologi dapat dilihat pada cuplikan jurnal teknologi Universitas Indonesia, makalah yang berjudul “Persamaan dan Perbedaan Elemen Pelat Lentur MZC dan DKQ untuk Bentuk Rektangular karya Irwan Katili”.

Pada umumnya teori orde primer pelat luntur, ada dua teori dasar pengembangan elemen hingga yang pertama berbasiskan pada teori pelat tipis

Kirchoff (1) yang mengabaikan deformasi geser transversal yang kedua adalah yang berbasiskan pada teori pelat tebal Reissnermindlin (2,3) yang memperhitungkan deformasi gesertransversal. Tidak seperti teori pelat Kirchoff yang membutuhkan kontinuitas C1, teori pelat Reissner hanya membutuhkan kontinuitas C0 untuk aproksimasi variabel kinematisnya (Jurnal Teknologi UI, 2005)

Bila dititik secara cermat, maka beberapa kosakata yang ada merupakan unsur serapan dari bahasa asing. Istilah yang dimaksudkan adalah teori, orde primer pelat lentur, pelat tipis, deformasi geser transversal, pelat tebal, kontinuitas, aproksimasi, variabel, dan kinematis istilah teori, orde primer, variabel, deformasi, transversal, aproksimasi, kinematis merupakan istilah yang tersaring dari mengisi kekosongan. Istilah tersaring ini dapat terjadi karena tidak memiliki padanan dalam BI.

Dengan memerhatikan contoh ini, dapat dikatakan istilah-istilah tersebut telah berterima di tengah lapisan masyarakat karena kekerapannya termuat dan terucap di media massa yang merupakan bagian dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang Alvin Tofler sebutnya sebagai gelombang sejarah ketiga peradaban manusia setelah gelombang penemuan pertanian dan gelombang revolusi industri.

(2) Menggalakkan Perkamusan

Kamus merupakan kitab yang berisi kandungan (entri dan keterangan) arti kata-kata (Purwadarminta: 1976). Dengan

demikian, kamus sesungguhnya berisi kandungan dan keterangan yang diperlukan oleh penggunaanya. Tiadalah arti akum jika mampu memenuhi keperluan penggunaanya. Jadi, fungsi terpenting dalam penggunaan kamus adalah tempat pencarian makna kata. Barnhart (1967) pernah meneliti tentang penggunaan kamus di Amerika Serikat, penelitian terhadap 56.000 orang mahasiswa lalu ia menemukan bahwa kamus terutama dipakai untuk mencari makna suatu kata, selanjutnya peringkat kedua tentang ejaannya, ditempat ketiga dan keempat adalah sinonim dan cara pemakaiannya serta peringkat kelima adalah etimologinya.

Dengan demikian, istilah yang dipergunakan oleh masyarakat tentu istilah yang telah dipahami/diketahui maknanya, sedangkan istilah yang tidak diketahui maknanya dapat diperoleh melalui kamus. Oleh karena itu, kamus harus merekam istilah yang sedang dan akan dipakai oleh masyarakat dengan penjelasan makna yang tepat/dipahami berdasarkan etika atau norma perkamusan.

(3) Ketersediaan Web Site di Internet berupa Bank Data Peristilahan BI

Alisjahbana (2000) yang mencirikan lima perubahan zaman. Saat ini, kita sudah memasuki fase ketiga yaitu fase perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ini ditandai dengan hadirnya teknologi tinggi yang dapat dikonsumsi dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi yang berbasis jaringan (network).

Kemajuan ini dalam hitungan detik selalu mengalami perubahan yang signifikan. Hasil perkembangan teknologi informasi yang menjadi primadona saat ini adalah teknologi jaringan komputer dunia yang sering disebut internet.

Mencermati peluang ini, pemerintah atau Pusat Bahasa, ataukah instansi terkait sebaiknya menggunakan fasilitas teknologi informasi ini untuk (1) dijadikan sebagai media penyebarluasan peristilahan/kosakata; (2) sebagai tempat mengefektifkan pencarian makna atau istilah guna pembelajaran/pemakaian kosakata BI; (3) membangun jaringan komunikasi antara perancang korpus bahasa dan masyarakat pemakai bahasa.

Dalam kaitan dengan ini, pihak pemerintah dalam hal ini Pusat Bahasa membuat web site di internet yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pengguna bahasa dalam mencari makna dan istilah. Oleh karena itu, web site berisi bank data peristilahan beserta maknanya dan unsur-unsur lainnya.

G. SIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan

Indonesia cerdas diwujudkan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

2. Bahasa Indonesia tidak hanya sekadar digunakan sebagai bahasa lokal, tetapi mampu berkiprah di dunia internasional dan memberikan masukan serta sinergi positif bagi kemajuan harkat dan martabat umat manusia di dunia.
3. Pembentukan istilah bahasa Indonesia diharapkan mampu mendukung bahasa Indonesia sebagai penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi, Dan sebaliknya, Iptek juga mampu menjadi daya dorong dan sekaligus penghasil terbentuknya istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian pada pembentukan istilah BI dengan memerhatikan aspek berikut ini (1) BI hendaknya diberi kesempatan membuka diri guna menerima istilah bahasa lain; (2) Peristilahan BI mampu menggambarkan realitas kehidupan serta menjawab tantangan konsep konsep Ipteks; (3) Peristilahan bahasa Indonesia itu tersebarluaskan berbagai media, kegiatan perkamusian tetap digalakkan, dan ketersediaan website dalam internet sebagai bank peristilahan..

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana. 2000. "Lima Ciri Perubahan Masyarakat Dunia". Artikel pada Harian Kompas.

Alwi, Hasan. 2003. Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. 2011.

- Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Kemdikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.
- Barnhat. C. L. 1967. "Problems in Editing Comersial Monolingual Dictionaries" dalam *Householder dan saporta* (edit).
- Dendi, Sugono. (edit). 2003. *Bahasa Indonesia Melalyu Masyarakat Madani*. Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa : Jakarta.
- Derap Guru Jawa Tengah-Edisi Nopember 2013, *Majalah Organisasi PGRI Jateng*.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Kemdikbud. 2013. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kridalaksana, Harimurti. (Ed) 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*: Kanisus: Jakarta.
- Madya, Suwarsih. 2013. *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: UNY Press.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Perkembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Djambatan: Jakarta.
- Putro, R. Haryanto, 1998. *Bahasa Indonesia, Iptek, dan Era Globalisasi*. Dalam Alwi. Hasan. Dkk. 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi Risalah*. Kongres BI VII. Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas: Jakarta.
- Tim Kemdikbud. 2013. *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK: Bahasa Indonesia (2013)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Kemdikbud. 2013. *Model Pengembangan Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Majelis Luhur Tamansiswa. 2012. *Buku Saku: Tamansiswa Badan Perjuangan Kebudayaan &Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Perguruan Tamansiswa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lama_nbahasa/berita diunduh 8 Februari 2015.